



**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM  
PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI KOPERASI  
DAN UMKM TAHUN 2017-2019**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Program Studi S1 Ilmu Politik**

**OLEH:  
ROCHMAH DIANING RATRI  
3312416038**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**



**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM  
PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI KOPERASI  
DAN UMKM TAHUN 2017-2019**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Program Studi S1 Ilmu Politik**

**OLEH:  
ROCHMAH DIANING RATRI  
3312416038**

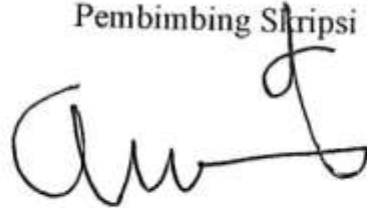
**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Juni 2020

Pembimbing Skripsi



Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M

NIP. 197207242000031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si

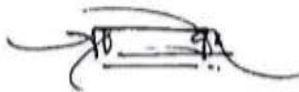
NIP. 196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 20 Oktober 2020

Penguji I



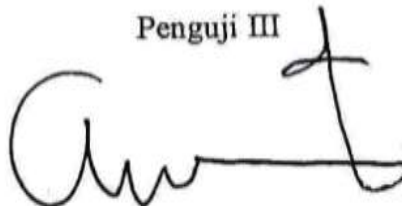
Dr. Eko Handoyo, M.Si.  
NIP. 196406081988031001

Penguji II



Erisandi Arditama, S.IP, M.A  
NIP. 198705012018031001

Penguji III



Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M  
NIP. 197207242000031001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A  
NIP. 196308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 21 Juli 2020



Rochmah Dianing Ratri

NIM. 3312416038

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

- "Untuk maju itu memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit, dua menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi." (Joko Widodo)
- "Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu, kita adalah perubahan yang dicari." (Barack Obama)
- "Setiap fase yang kamu jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke fase berikutnya." (Merry Riana)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*"Sesungguhnya Allah tidak mengubah Keadaan (nasib) sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan (perilaku) yang ada pada diri mereka sendiri" (QS. al-Ra'd: 11).*

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi Ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Baktrani dan Ibu Suprapti atas segala cinta kasih dan sayangnya.
2. Adik-adikku Tercinta, Asri dan Putri atas dukungan dan motivasinya.
3. Dosen pembimbing Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M.
4. Sahabat-sahabat tercinta, Amos, Uus, Enjel dan Hani terimakasih atas perhatian, motivasi, dan doa agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Kawan-kawan Ilmu Politik 2016 yang telah menjadi penyemangat bagi saya.
6. Almamater Universitas Negeri Semarang atas kesempatan dan ilmu yang diberikan.

## PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi Dan UMKM Tahun 2017-2019”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial di Universitas Negeri Semarang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta pengalamannya.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memudahkan penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik.
3. Drs. Tijan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memudahkan penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik.
4. Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M selaku Dosen Pembimbing, atas waktu dan kesediaannya memberikan ilmu, bimbingan, saran dan kritik dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Eko Handoyo, M.Si. selaku Dosen Penguji I, atas kesediaannya memberikan ilmu, bimbingan, saran dan kritik dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Erisandi Arditama, S.IP, MA selaku Dosen Penguji II, atas kesediaannya memberikan ilmu, bimbingan, saran dan kritik dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orangtuaku, Ibu Suprpti dan Bapak Baktrani, yang selalu mendoakan, merawat, menasehati, membimbing, dan mendukungku tanpa henti;

8. Adikku Asri dan Putri, yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan mendukungku tanpa henti;
9. Nenekku Sukarti dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tanpa henti;
10. Ch. Tri Subekti Widayati, S.H, M.M, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
11. Fajar Pramukti, S.E, Kasubid Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
12. Sujono H.N, Pengurus Tomira KUD Harapan Temon yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
13. Sri Puji Astuti, Pemilik UMKM Manunggal yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
14. Sahabat-sahabatku Amos, Fitria, Wiwik, Herning, Krisna, Enjelina, Hani, dan Uswatun terima kasih atas saran, dukungan dan bantuannya.
15. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2016 yang sudah memberikan banyak inspirasi dan semangat kepadaku;

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



## SARI

**Ratri, Rochmah Dianing.** 2020. *Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M. 210 hlm.

**Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah, Pengembangan Potensi Lokal, Koperasi dan UMKM**

Hasto Wardhoyo sebagai Bupati Kulon Progo pada tahun 2012 menjadikan potensi lokal Kulon Progo mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk dikelola dan dikembangkan. Inovasi kebijakan publik Bupati dengan kebijakan Bela dan beli Kulon Progo dalam mendorong pengembangan potensi lokal untuk melindungi produk lokal Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti adalah 1) Kebijakan- kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal Melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019. 2) Efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendiskripsikan kebijakan-kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal Melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019. 2) Untuk mendiskripsikan efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal Melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM, Koperasi, UMKM dan masyarakat. Sumber data sekunder berasal dari RPJMD, LKJIP Bappeda, dan LKJIP Dinas Koperasi dan UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitiannya adalah kantor BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, UMKM Manunggal, dan Tomira KUD Harapan Temon. Fokus penelitiannya adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal di tahun 2017-2019 dan faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal tahun 2017-2019.

Hasil penelitian ini adalah 1) Efektivitas pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan yaitu kebijakan publik yang dibuat sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo yang berada pada letak yang strategis untuk meningkatkan pemasaran produk lokal, ketepatan pelaksanaan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM kerjasama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Indomarco untuk pemasaran produk Koperasi dan UMKM, bekerjasama dengan perbankan BUMN, BUMD untuk pinjaman modal serta pelatihan pengemasan produk, ketepatan target yaitu Koperasi telah

melakukan *takeover* pada 19 toko modern untuk memasarkan produk lokal Kabupaten Kulon Progo, produk sudah memiliki HKI dan ketepatan lingkungan baik Pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, pelaku Koperasi dan UMKM serta masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dan searah. 2) Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo jiwa *entrepreneurship* yang masih rendah, kurangnya *skill*, sering berganti-ganti usaha, belum memiliki pemasaran *online* atau *marketplace* serta belum adanya UMKM *Center* dan Rumah Kemasan.

Mengacu pada hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan saran program yang belum tercapai untuk menjadi evaluasi Pemerintah Daerah serta Dinas Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan program pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tersebut serta dilakukan pengawasan dan evaluasi mengenai faktor penghambat dalam tercapainya program untuk mengetahui kendala apa saja yang didapatkan oleh Koperasi dan UMKM serta solusi dalam mengatasi berbagai masalah.

## ABSTRACT

**Ratri, Rochmah Dianing.** 2020. *The Effectiveness of Public Policies of the Kulon Progo Regency Government in Developing Local Potentials Through Cooperatives and MSMEs in 2017-2019*. Final Project, Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Advisor Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M. 210 pages.

**Keywords: Effectiveness of Local Government Public Policy, Local Potential Development, Cooperatives and MSMEs**

Hasto Wardhoyo as Regent of Kulon Progo in 2012 made the local potential of Kulon Progo start to get attention from the local government to be managed and developed. The district head's public policy innovation with the Bela and Buy Kulon Progo policy in encouraging the development of local potential to protect the local products of the Kulon Progo Regency Cooperatives and MSMEs. Based on the above background, the formulations of the problems studied are 1) Public policies of the Kulon Progo Regency Regional Government in developing local potential through Cooperatives and MSMEs in 2017-2019. 2) The effectiveness of the Kulon Progo District Government's public policies in developing local potential through Cooperatives and MSMEs in 2017-2019. The objectives of this study are 1) To describe the public policies of the Kulon Progo Regency Government in developing local potential through cooperatives and MSMEs in 2017-2019. 2) To describe the effectiveness of the Kulon Progo District Government's public policies in developing local potential through Cooperatives and MSMEs in 2017-2019.

This study uses a qualitative method. Primary data sources came from the Department of Cooperatives and MSMEs, Cooperatives, MSMEs and the community. Secondary data sources come from the RPJMD, LKJIP Bappeda, and LKJIP from the Cooperatives and MSMEs Offices. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The research locations are the BAPPEDA office of Kulon Progo Regency, the Office of Cooperatives and MSMEs in Kulon Progo Regency, Manunggal MSMEs, and Tomira KUD Harapan Temon. The focus of his research is the effectiveness of implementing public policies of the Kulon Progo Regency Government in developing local potential in 2017-2019 and supporting factors and inhibiting factors of the Kulon Progo Regency Regional Government's public policies in developing local potential in 2017-2019.

The results of this study are 1) The effectiveness of the implementation of public policies of the Kulon Progo Regency Government in developing local potential which can be seen from the accuracy of policies, namely public policies made according to the potential of Kulon Progo Regency which is in a strategic location to increase the marketing of local products. implementation accuracy, namely the Cooperative and MSMEs Office in collaboration with PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Indomarco for marketing Cooperative and MSMEs

products, collaborating with state-owned banks, BUMD for capital loans and product packaging training, target accuracy, namely the Cooperative has taken over 19 modern shops marketing local products in Kulon Progo Regency, products that already have IPR and environmental accuracy, both the local government, the Office of Cooperatives and SMEs, cooperatives and MSMEs actors and the community can work together properly and in one direction. 2) The factors inhibiting the implementation of public policies of the Kulon Progo Regency Government are still low entrepreneurial spirit, lack of skills, often changing businesses, do not have online marketing or marketplaces and the absence of MSMEs Center and Packaged Houses.

Referring to the results of this study, the researchers propose program suggestions that have not been achieved to become an evaluation of the Regional Government and the Office of Cooperatives and MSMEs in implementing local potential development programs through cooperatives and MSMEs as well as monitoring and evaluating the inhibiting factors in achieving the program to find out what obstacles Cooperatives and MSMEs get only as well as solutions in overcoming various problems.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>SARI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat .....	6
E. Batasan Istilah .....	8

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Deskripsi Teoritis.....	13
1. Kebijakan Publik.....	13
2. Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	18
3. Efektivitas Kebijakan Publik .....	29
4. Potensi Lokal .....	34
a. Pangan Lokal .....	36
b. Koperasi .....	37
c. UMKM .....	39
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan.....	43
C. Kerangka Berpikir.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Latar Penelitian.....	60
B. Fokus Penelitian.....	62
C. Sumber Data.....	63
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Uji Validitas Data.....	67
F. Teknik Analisis Data .....	68
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Umum Daerah .....	71
B. Hasil Penelitian .....	74

1. Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 .....	74
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.....	91
C. Pembahasan.....	100
1. Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 .....	101
2. Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>119</b>
5.1 Simpulan.....	119
5.2 Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>127</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Nama Produk dan Alamat UMKM Penyetor Tomira KUD Harapan Temon .....	88
Tabel 4.2 Daftar UMKM Yang Memperoleh Fasilitas HKI Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2019.....	94
Tabel 4.3 Daftar Toko Modern Yang Telah Di Take Over Oleh Koperasi .....	95



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III.....	20
Gambar 2.2 Model Keefektifan Implementasi Kebijakan menurut Matrik Matland .....	32
Gambar 2.3 Implementasi Kebijakan sesuai dengan isu kebijakannya Matrik Matland .....	33
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir .....	59
Gambar 4.1 Kondisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Usulan Topik .....	127
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing .....	128
Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian.....	129
Lampiran 4 Instrumen Penelitian .....	124
Lampiran 5 Realisasi Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.....	131
Lampiran 6 Realisasi Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.....	139
Lampiran 7 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap RPJMD Sampai Dengan Tahun 2019 .....	144
Lampiran 8 Hasil Wawancara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo .....	149
Lampiran 9 Hasil Wawancara BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo.....	153
Lampiran 10 Hasil Wawancara UMKM Kabupaten Kulon Progo .....	160
Lampiran 11 Hasil Wawancara Koperasi Kabupaten Kulon Progo.....	169
Lampiran 12 Data Perkembangan UMKM Tahun 2017-2019.....	173
Lampiran 13 Perkuatan Modal dan Bantuan penguatan permodalan bagi UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.....	178
Lampiran 14 Perkuatan Modal dan Bantuan penguatan permodalan bagi UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.....	179
Lampiran 15 Daftar Koperasi Baru Tahun 2019.....	180
Lampiran 16 Koperasi yang Melaksanakan PAD Tahun 2019.....	181

Lampiran 17 Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019.....	182
Lampiran 18 Daftarn Koperasi Aktif di Kabupaten Kulon Progo .....	184
Lampiran 19 Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019	185
Lampiran 20 Gambar-Gambar Pendukung .....	186
Lampiran 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 tahun 2016.....	191

## **DAFTAR SINGKATAN TEKNIS DAN TANDA**

PSU	: Prasarana Sarana dan Utilitas
Sarpras	: Sarana dan Prasarana
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
KUMKM	: Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
WTP	: Water Treatment Plant
IKM	: Industri Kecil Menengah
KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
RIPARDA	: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TDUP	: Tanda Daftar Usaha Pariwisata
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
KIE	: Komunikasi Informasi dan Edukasi
PKBL	: Program Kemitraan Bina Lingkungan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Efektivitas pemerintah negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Ketidakmampuan Kepala Daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah, berimplikasi pada rendah dan berkurangnya efektivitas kinerja penyelenggaraan pembangunan nasional. Dari tinjauan organisasi dan manajemen, Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau manajer pemerintah daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah (Kaloh, 2009:4).

Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberi kesempatan yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Pembangunan dimaksudkan untuk mencapai pemerataan pembangunan

dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejak tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo gencar dalam mengembangkan potensi lokal yaitu sejak menjabatnya Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo potensi lokal Kabupaten Kulon Progo lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk lebih dikelola dan lebih dikembangkan. Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) adalah Bupati Kulon Progo sekaligus bekerja sebagai dokter spesialis kandungan. Hasto Wardoyo menjabat sebagai Bupati Kulon Progo selama dua periode yaitu sejak 2011-sekarang. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2011, Hasto Wardoyo bersama pasangannya Sutedjo yang di dukung PDIP, PAN dan PPP berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kulon Progo dengan perolehan suara 46,29% dari jumlah pemilih. Hasto Wardoyo terkenal berkat inovasinya dalam memimpin kulon progo dalam pengembangan pariwisata serta pengembangan produksi produk lokal

melalui kebijakan “Bela dan Beli Kulon Progo”. Inovasi-inovasi yang dilakukan Hasto Wardoyo selama memimpin Kulon Progo mengantarkannya kembali terpilih sebagai Bupati Kulon Progo pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 bersama wakilnya Sutedjo. Pasangan inkumben ini memenangkan pilkada 2017 dengan meraih 85% suara dengan diusung koalisi gemuk yaitu partai PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKS, Hanura, NasDem dan PPP.

Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo terkenal berkat inovasinya dalam memimpin Kulon Progo dalam mendongkrak pengembangan potensi lokal melalui program “Bela dan Beli Kulon Progo”. Pelaksanaan kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo ini dimulai dengan pengembangan destinasi wisata yang dikelola pemerintah kabupaten bersama masyarakat, kemudian mewajibkan PNS dan pelajar untuk menggunakan batik gebleg renteng yang merupakan batik khas Kulon Progo demi mendongkrak industri batik lokal. Hasto Wardoyo juga mewajibkan PNS untuk membeli beras hasil petani Kulon Progo 10 kilogram setiap bulannya, bahkan beras RASTRA di Kulon Progo menggunakan beras hasil produksi petani Kulon Progo. Hasto Wardoyo juga mengembangkan usaha PDAM Kulon Progo dengan memproduksi air kemasan merk AirKu (Air Kulon Progo) serta *takeover* supermarket seperti Alfamart dan Indomaret oleh koperasi dan diganti dengan nama Tomira (Toko Milik Rakyat) yang dikelola oleh Koperasi di Kulon Progo untuk memasarkan produk lokal UMKM masyarakat Kulon Progo.

Keberadaan Kulon Progo yang berada pada posisi yang strategis yaitu pada jalur lintas selatan Pulau Jawa yang merupakan jalur distribusi barang dan jasa serta dengan adanya pembangunan bandara YIA memberikan dampak bagi masyarakat yaitu terutama dengan peluang produk-produk luar Kabupaten Kulon Progo yang berusaha masuk ke Kulon Progo sehingga keberadaannya dapat mengancam produk-produk lokal masyarakat Kulon Progo. Kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo sebagai promosi yang mengarahkan masyarakat Kulon Progo untuk membela Kulon Progo dengan membeli produk-produk lokal masyarakat Kulon Progo. Pengembangan produk lokal dilakukan dengan meningkatkan kinerja koperasi yang melakukan *takeover* pada swalayan modern di Kulon Progo menjadi TOMIRA (Toko Milik Rakyat) sebagai wadah UMKM dalam pemasaran produk.

Keberadaan Kulon Progo yang strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan koperasi dan UMKM dengan berbasis potensi lokal diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Kulon Progo mengingat tingkat kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tingkat perekonomian masyarakat Kulon Progo yang berada pada posisi terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pengembangan koperasi dan UMKM masyarakat didorong untuk memiliki jiwa *entrepreneurship* sehingga memiliki kemandirian ekonomi



Kebijakan yang dibuat Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo dalam pengembangan produk lokal melalui Koperasi dan UMKM dengan semangat “Bela dan Beli Kulon Progo” memberikan kesempatan bagi masyarakat Kulon Progo untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan perlindungan terhadap potensi lokal masyarakat Kulon Progo serta peningkatan perekonomian dengan berbasis ekonomi kerakyatan. Kebijakan dapat berjalan dengan adanya kerjasama yang baik dan terarah antara Pemerintah Daerah, SKPD, Koperasi dan UMKM serta masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pengembangan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo melalui Koperasi dan UMKM. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019?

### **C. TUJUAN**

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

### **D. MANFAAT**

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu politik khususnya mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan publik Matrik Matland yang memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Bagi Kepala Daerah, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi mengenai efektivitas kebijakan publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo sehingga bermanfaat untuk pemantauan pelaksanaan program-program yang dihasilkan.

- b. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi tentang perencanaan program dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan pada kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.
- c. Bagi BAPPEDA, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi tentang perencanaan program dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan pada kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.
- d. Bagi DPRD, penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan program kerja atau kebijakan yang berdasarkan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo sehingga bermanfaat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- e. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai masukan bagi pihak pemerintah Daerah maupun masyarakat dan dinas terkait mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam

pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

- f. Bagi Mahasiswa, agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

#### **E. BATASAN ISTILAH**

Untuk menghindari perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari pendapat beberapa pakar dalam bidangnya. Namun sebagian batasan istilah ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

##### **1. Kebijakan Publik**

Menurut Hardiono (2018:11) menyatakan “Kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan berbagai hal di dalam kehidupan masyarakat yang suatu ketika dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika yang ada. Pentingnya fleksibilitas dari suatu kebijakan publik dimaksudkan agar sebuah *policy* dapat mengikuti perkembangan keadaan. Munculnya sebuah kebijakan publik merupakan bentuk reaksi dari adanya suatu permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Realitas kebijakan publik merupakan

otoritas karena dibuat oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang *legitimate* dalam sistem pemerintahan”.

Menurut Pantjar Siamatupang (2003:2) menyatakan “Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang *legitimate* untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan *private* (individu atau lembaga swasta). Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Pertama, dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat luas (publik)”.

## 2. Efektivitas Kebijakan Publik

Pada prinsipnya Matrik Matland dalam Yulianto Kadji (2015:78-80) memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

### 1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari: (a) Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah: *how excellent is the policy*, (b) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan (c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

### 2. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*). Beberapa contoh sebaiknya pihak mana yang paling berperan, misalnya: (a) Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. (b) Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. (c) Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis, maka sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

### 3. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni: (a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, (b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah

kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak, dan (c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama sekali tidak efektifnya dengan kebijakan.

#### 4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. (b) Lingkungan Eksternal Kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa,

kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

### 3. Potensi Lokal

Kata potensi berasal dari bahasa Inggris *to potent* yang berarti keras atau kuat. Lokal adalah suatu hal yang berasal dari daerah sendiri. Lokal yaitu, suatu hal yang berasal dari tempat daerah asal atau asli daerah tersebut, yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat agar menjadi hal yang bermanfaat dari daerah asalnya tersebut. Mengacu kepada pendapat Victorino dalam Hatimah (2006:41), ciri umum dari potensi lokal adalah:

- a. Ada pada lingkungan suatu masyarakat.
- b. Masyarakat merasa memiliki.
- c. Bersatu dengan alam.
- d. Memiliki sifat universal.
- e. Bersifat praktis.
- f. Mudah dipahami dengan menggunakan *common sense*.
- g. Merupakan warisan turun temurun.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. DESKRIPSI TEORITIS**

##### **1. Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho dalam Eko Handoyo, 2012:6).

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik

sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Taufiqurrokhman, 2014: 3). Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai “*A projected program of goal, value, and practice*” atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Taufiqurrokhman, 2014:3). Menurut Dunn dalam Kamal Alamsyah (2016:5), “*Public policy is a commitment to a course or plan of action agreed to by a group of people with the power to carry it out*” menekankan bahwa kebijakan publik harus bermodalkan kekuatan dan konsistensi atau dengan kata lain, pemerintah saat ini perlu meningkatkan *self-confidence*, keyakinan, kematangan perhitungan, dan perencanaan atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya sebagai bentuk dari kebijakan publiknya.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi

kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye dalam Taufiqurokhma, 2014:7).

Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2007:20) menyatakan konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

Menurut Nugroho dalam Taufiqurrokhman (2014:4), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Taufiqurrokhman (2014:4) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R. Dye yang dikutip Kamal Alamsyah (2016:28), mengatakan bahwa : *Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things; they regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and materials services to members of the society; and they extract money from society, most often in the form of taxes. Thus public policies may be regulative, organizational, distributive, or extractive –or all these things at once.* (Kebijakan publik pemerintahan apa pun memilih untuk melakukan atau tidak melakukan banyak berpikir karena mereka mengatur konflik dalam masyarakat, mereka mengatur masyarakat untuk melanjutkan konflik dengan masyarakat lain, mereka mendistribusikan berbagai macam penghargaan simbolik dan jasa bahan kepada anggota masyarakat dan mereka mengambil uang dari masyarakat, paling sering dalam bentuk pajak. Dengan demikian

kebijakan publik mungkin regulatif, organisasi, distributif atau ekstraktif atau semua hal ini sekaligus).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Charles O. Jones dalam Yuliato Kadji (2015:10-11) menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen:

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
3. *Programs*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
4. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

5. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder)

Islamy dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017:3)

mengemukakan pengertian kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Yulianto Kadji (2015:48) Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Van Metter dan Van Horn, mendefinisikan bahwa implementasi Kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana atau implementor kebijakan (Yulianto Kadji, 2015:48).

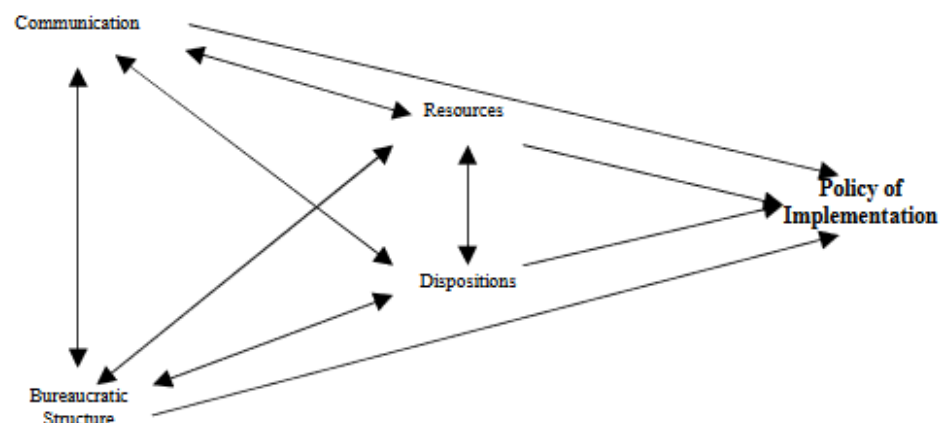
Kebijakan publik yang diimplementasikan dengan baik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan publik, sekaligus mendorong terciptanya partisipasi publik dalam pembangunan secara luas. Tegasnya, bahwa dalam aspek implementasi kebijakan perlu dipahami dan dicermati : i) apa yang patut dan layak dilakukan serta apa tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dan implementor dalam tahapan implementasi kebijakan, ii) apa penyebab atau yang mem-

pengaruhinya, dan iii) apa dampak dan nilai tambah dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (Yulianto Kadji, 2015:49-50).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar berupa serangkaian kegiatan untuk meraih kinerja sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pelaksana dan implementator kebijakan tersebut. Menurut George Edwards III dalam Yulianto Kadji (2015:48) mengemukakan:

*“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”.*

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka George Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *“Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”*.



**Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III**



Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada *implementor* secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akanberakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka *implementor* bukan hanya mengetahui apa yangharus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

(1) *Communication* (Komunikasi)

George Edwards III (1980) menegaskan:

*“For Implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended”.*

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam memahami dekripsi tugas yang harus dilakukannya.

Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan. Dalam tataran inilah, maka faktor komunikasi (dalam bentuk vertikal) memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Sebab, tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para *implementor*

menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik.

Inkonsistensi pesan dan isi komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam implementasi kebijakan. Aktivitas komunikasi dalam rangka penyampaian pesan informasi kebijakan tersebut, harus pula memperhatikan bentuk komunikasi organisasi secara umum, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang diciptakan dan terbentuk secara terencana, melalui jalur-jalur formal dalam organisasi publik, yang melekat pada saluran-saluran yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan melalui struktur organisasi. Kedua, komunikasi non formal, adalah komunikasi yang ada di luar struktur organisasi publik, biasanya melalui saluran-saluran non formal yang munculnya bersifat insidental, menurut kebutuhan atau hubungan interpersonal yang baik, atau atas dasar kesamaan kepentingan. Inti dari kedua bentuk komunikasi tersebut bermuara pada penciptaan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara individual maupun kolektivitas dalam sebuah organisasi.

(2) *Resourches* (Sumber Daya)

Sehubungan dengan faktor *Resourches* (Sumber Daya), George Edwards III (1980) menjelaskan :

*“Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure the policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed”.*

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik.

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif. Betapapun jelas, akurat dan konsistennya perintah implementasi kebijakan tersebut, namun apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber

daya dalam pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya yang penting antara lain jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan, serta dukungan fasilitas, termasuk sarana/prasarana, dan aktivitas untuk memberikan pelayanan publik. Sumber daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan, pelayanan prima tidak akan dilaksanakan, dan aturan-aturan yang masuk akal pun tidak akan disusun dengan sebaik-baiknya.

(3) *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana)

George Edwards III (1980) menjelaskan:

*“The dispositions or attitudes of implementations is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their discretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies affecting their organizational and personal interests”.*

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan.

Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Terkadang para implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan

disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya. Jika para *implementor* memiliki kecenderungan sikap yang baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung melaksanakannya sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para *implementor* berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan semakin tidak terarah dan bahkan akan membingungkan.

(4) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

George Edwards III (1980) menjelaskan:

*“Even If sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked”.*

Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para *implementor* mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam

implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur oprasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Standar kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi kebijakan.

Para implementor kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat dalam proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan tetap menghambat implementasi kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak



diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah, dan inilah sebab musabab terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan publik.

### **3. Efektivitas Kebijakan Publik**

Menurut Patrio Sutopo dalam Mayadri (2017:3) Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan. dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai (Kamal Alamsyah (2016:65).

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai atau diimplementasikan apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci; program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya serta lingkungan (*environment*) yang saling mempengaruhi sehingga implementasi kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif

dan subjektif dari perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktek empiriknya (Yulianto Kadji, 2015:78).

Pada prinsipnya Matrik Matland dalam Yulianto Kadji (2015:78-80) memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari: (a) Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah: *how excellent is the policy*, (b) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan (c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*). Beberapa contoh sebaiknya pihak mana yang paling berperan, misalnya: (a) Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. (b) Kebijakan yang bersifat memberdayakan

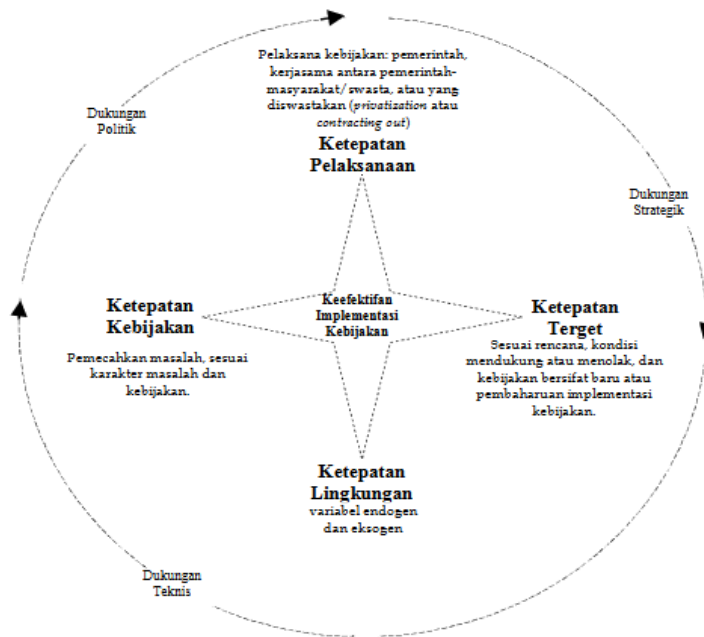
masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. (c) Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis, maka sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni: (a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, (b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak, dan (c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama sekali tidak efektifnya dengan kebijakan.

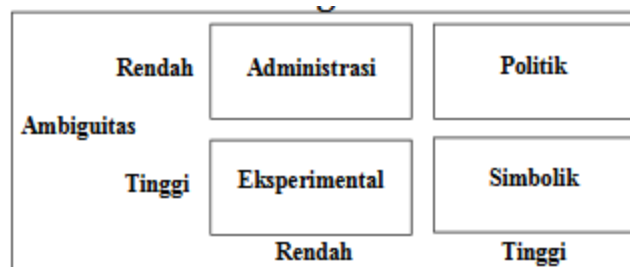
d. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. (b) Lingkungan Eksternal Kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Keempat “tepat” tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: (1) dukungan politik, (2) dukungan strategik, dan (3) dukungan teknis.



**Gambar 2.2 Model Keefektifan Implementasi Kebijakan menurut Matrik Matland**

Selain tiga dukungan di atas, penelitian ataupun analisis tentang implementasi kebijakan sebaiknya juga menggunakan model implementasi yang sesuai dengan isu kebijakannya, sebagaimana yang digambarkan Matland berikut ini:



**Gambar 2.3 Implementasi Kebijakan sesuai dengan isu kebijakannya Matrik Matland**

#### **4. Potensi Lokal**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi lokal adalah kekayaan alam budaya, dan SDM pada suatu daerah. Potensi alam di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, iklim, dan bentang alam daerah tersebut. Perbedaan kondisi alam menyebabkan perbedaan dan ciri khas potensi lokal suatu wilayah. Kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, dan kesejahteraan masyarakat membentuk segitiga interaksi yang saling berkaitan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman masyarakatnya dan budaya. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan pembangunan harus memperhatikan hal tersebut.

Potensi lokal mempunyai makna sebagai sumber/ kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dapat dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Potensi lokal pada intinya merupakan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Potensi lokal berkembang dari tradisi kearifan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang bersahaja sebagai bagian dari kebudayaannya (Rizqi Choironi, 2018: 52-54).

Kindervatter dalam Rizqi Choironi (2018: 54), menyatakan bahwa pada prinsipnya masyarakat itu memiliki potensi atau kekuatan yang dapat dikembangkan dalam kehidupannya, melalui partisipasi,

kolaborasi, demokrasi, kesederajatan, pembebasan dan peningkatan. Mengacu kepada pendapat Victorino dalam Hatimah (2006:41), ciri umum dari potensi lokal adalah:

- a. Ada pada lingkungan suatu masyarakat
- b. Masyarakat merasa memiliki,
- c. Bersatu dengan alam,
- d. Memiliki sifat universal,
- e. Bersifat praktis,
- f. Mudah dipahami dengan menggunakan *common sense*,
- g. Merupakan warisan turun temurun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Produk Lokal Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud produk lokal yaitu:

(4) Produk Lokal yang berciri khas Daerah yang selanjutnya disebut produk lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.

(5) Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan produk lokal.

Dalam penelitian ini kebijakan pengembangan potensi lokal dibatasi hanya pengembangan pangan lokal yang berupa produk makanan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat seperti singkong, mlinjo, beras, ubi dll serta memiliki merk dagang dan berlogo Bela dan Beli Kulon Progo.

**a. Pangan Lokal**

Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumber daya wilayah dan budaya setempat. Oleh karenanya jenis, jumlah dan kualitas produk pangan lokal akan sangat tergantung pada kondisi spesifik yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi ini bukan hanya pada kesesuaian lahan, sifat tanah, iklim dan aspek budidaya yang mempengaruhi, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat wilayah tersebut. Beragam pangan lokal tersebar di wilayah Indonesia, misalnya jagung, garut, ganyong, gambili, gadung, uwi dan singkong (Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI dalam Puji Utami, 2015: 151-152).

Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Di samping itu, produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen lokal pula. Sehingga produk pangan lokal ini berkaitan erat dengan budaya lokal setempat. Karena itu, produk ini sering kali menggunakan nama daerah, seperti gudek joky, dodol garut, jenang kudus, beras cianjur, dan sebagainya (Hariyadi dalam Well Yuliatmoko, 2010).



**b. Koperasi**

Pengertian koperasi di Indonesia tertuang dalam UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peran koperasi yang tertuang dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Anoraga dan Widiyanti dalam Shaifur Rizqi Zein (2015) menyatakan bahwa ada dua upaya terobosan yang perlu ditempuh

untuk mempercepat pengembangan koperasi, yaitu memberikan akses lebih besar kepada koperasi dalam mendapatkan modal usaha, serta dilakukan penyesuaian terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku dalam dunia usaha. Beliau juga menyatakan bahwa ada tiga penjabaran kebijakan dasar pengembangan koperasi, yaitu:

- 1) Tahap awal didukung oleh peranan pemerintah yang cukup besar dalam hal prakarsa, pemberian bimbingan, dan bantuan usaha.
- 2) Tahap kedua merupakan tahap perkembangan swadaya koperasi.
- 3) Tahap ketiga diharapkan koperasi mampu berswadaya di atas kekuatannya sendiri.

Marta dalam Shaifur Rizqi Zein (2015) menyatakan bahwa perkembangan koperasi tidak lepas dari pengaruh keadaan lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Faktor lingkungan internal koperasi adalah sarana dan sumber daya yang ada dalam koperasi yang secara langsung mempengaruhi perkembangan kemajuan koperasi. Faktor yang mempengaruhi lingkungan internal antara lain organisasi, sumber daya manusia, unit usaha, dan keuangan. Sedangkan, faktor lingkungan eksternal koperasi adalah faktor-faktor luar koperasi yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan kemajuan koperasi. Faktor-faktor tersebut adalah ekonomi, kebijakan pemerintah, sosial budaya, teknologi, dan pesaing.

**c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

- (4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- (5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - i. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - ii. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pengertian pengembangan UMKM yaitu Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, Peningkatan daya saing UMKM,

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Menurut Gede Diva dalam Khoirul Anam (2019:6), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator:

a. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung.

b. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif.

c. Peran Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Untuk dapat menjalankan

perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Dalam penelitian ini kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dibatasi hanya pada Koperasi dan UMKM yang memproduksi dan memasarkan produk pangan lokal Kabupaten Kulon Progo yang memiliki merk dagang dan logo Bela dan Beli Kulon Progo.

## **B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.. Beberapa penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang membahas mengenai kebijakan publik dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dari sudut pandang implementasi kebijakan publik. Namun, dalam penelitian ini mendiskripsikan kebijakan publik dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu Efektivitas

Kebijakan Publik Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Elson G. Budi Susilo dan Rijanta (2017) dalam penelitian mengenai Kajian Implementasi “Bela-Beli Kulon Progo” (Kasus: Air-Ku, Batik Geblek Renteng, Dan Tomira). Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi “Bela-Beli Kulon Progo” di lapangan dijelaskan dalam beberapa dimensi yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, kerja sama, dan konstruksi keruangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Elson G. Budi Susilo dan Rijanta tersebut yaitu penelitian ini membahas Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Elson G. Budi Susilo dan Rijanta menggunakan kajian implementasi kebijakan publik.
2. Penelitian Yuli Rahmini Suci (2017) dalam penelitian mengenai Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah Kelemahan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan



terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Kekawatiran ini dilandasi bahwa Indonesia akan menghadapi MEA dan pasar bebas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yuli Rahmini Suci tersebut yaitu penelitian ini membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland.

3. Penelitian Bachtiar Rifa'i (2013) dalam penelitian mengenai Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut yaitu dengan adanya program pemberdayaan UMKM bisa membantu para pengrajin krupuk ikan yang ada di Desa Kedung Rejo terutama pada pengrajin kecil dan musiman yang memang membutuhkan dana untuk meningkatkan pendapatan serta produksi krupuk ikan mereka, dan juga berdampak pada eksisnya potensi yang berada di kampung krupuk ikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bachtiar Rifa'i tersebut yaitu pada penelitian ini membahas pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk

pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland.

4. Penelitian Beni Rinaldi (2018) dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM Oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang. Hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan kondisi yang belum baik. Terutama jika dilihat dari indikator kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan, serta revisi kebijakan. Sedangkan jika dilihat dari indikator keluaran kebijakan dan persepsi terhadap dampak, menunjukkan kondisi yang sudah baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Beni Rinaldi tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Beni Rinaldi menggunakan kajian implementasi kebijakan publik.
5. Penelitian Khoirul Anam (2019) dalam penelitian mengenai Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian tersebut yaitu ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing dan penanggulangan kemiskinan serta termasuk pengembangan usaha yang ramah terhadap lingkungan. Serta hambatan yang dialami adalah kurangnya SDM, anggaran, sarana dan prasarana. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian Khoirul Anam tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Khoirul Anam membahas strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM.

6. Penelitian Feni Dwi Anggraeni, dkk (2013) dalam penelitian mengenai Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok USAHA “Emping Jagung di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Hasil penelitian tersebut yaitu Pengembangan secara internal dengan cara menggunakan modal awal dengan tabungan sendiri, melakukan inovasi untuk hasil produksinya, memperluas jaringan pemasaran, dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Selain itu, fasilitasi dari pihak eksternal yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Feni Dwi Anggraeni tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan

UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland.

7. Penelitian Beny Patrisadia (2016) dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Koperasi di Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian tersebut yaitu implementasi program pengembangan koperasi belum berjalan optimal dilihat dari isi kebijakan, bahwa pemahainan kepentingan dan ketepatan sasaran program belum maksimal dan sangat terbatas karena banyak koperasi yang belum menerima program dimaksud, terbatasnya koperasi yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, sosialisasi prinsip-prinsip koperasi, dan pemberian bantuan modal. Kurangnya pemahaman anggota koperasi karena kompetensi SDM yang rendah dan pemahaman sumber daya aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM kurang memadai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Beny Patrisadia tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Beny Patrisadia menggunakan kajian implementasi kebijakan publik.
8. Penelitian Muhammad Bohori (2019) dalam penelitian mengenai Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya. Hasil penelitian tersebut yaitu Peran Dinas Koperasi sangat

penting bagi pengembangan dan pembangunan dalam sektor ekonomi, karena peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi. Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan menjadi 3 macam bentuk dari peran Dinas Koperasi yaitu; peran Dinas Koperasi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Bohori tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Muhammad Bohori membahas peran Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM.

9. Penelitian Suci Astari (2019) dalam penelitian mengenai Strategi Dinas Koperasi dan UKKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hasil penelitian tersebut yaitu strategi –strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat untuk mengembangkan UMKM adalah strategi perkuatan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan melakukan promosi produk, strategi pemberdayaan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian Suci Astari tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Suci Astari membahas strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM.

10. Penelitian Dian Andhiny Pramasari (2009) dalam penelitian mengenai Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Hasil penelitian tersebut yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta hanya menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta melakukan kegiatan kegiatan yaitu Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM, Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM, dan Fasilitasi Pengembangan UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dian Andhiny Pramasari tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix

Matland sedangkan penelitian Dian Andhiny Pramasari membahas strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM.

11. Penelitian A. Atha Hidayatullah (2017) dalam penelitian mengenai Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Oleh Pihak Ketiga Untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung. Hasil penelitian tersebut yaitu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Bank Pelaksana tidak mengharuskan pemohon untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini dikarenakan merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Pelaksana. Faktor penghambat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga yaitu tersendatnya pembayaran angsuran kredit tersebut dan sektor usaha yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memiliki keuntungan yang tidak stabil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian A. Atha Hidayatullah tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian A. Atha Hidayatullah membahas permodalan dalam pengembangan UMKM.
12. Penelitian A. Muhammad Farid Said (2015) dalam penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan). Hasil penelitian tersebut yaitu strategi pemberdayaan Dinas Koperindag

dalam memberdayakan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada fase inisial cukup berperan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Selanjutnya pada fase partisipatorismasyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. Sementara pada fase emansipatoris pemerintah masih terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian A. Muhammad Farid Said tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian A. Muhammad Farid Said membahas strategi pengembangan UMKM.

13. Penelitian Hamami Cahya Prastika (2017) dalam penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian tersebut yaitu peran pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan baik. Tipologi dari peran pemerintah yaitu terdapat pada peran pemerintah sebagai fasilitator karena pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit, menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM serta memberikan pelatihan. Perbedaan penelitian ini dengan



penelitian Hamami Cahya Prastika tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Hamami Cahya Prastika membahas peranpemerintah daerah dan UMKM dalam pengembangan UMKM.

14. Penelitian Putra Yoga (2020) dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang. Hasil penelitian tersebut yaitu Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diKabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang masih tidak sesuai antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan, dikarenakan koperasi tidak dalam pengangkatan kepengurusan hanya berdasarkan kesepakatan orang-orang tertentu saja yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perbedaan penelitian ini dengan Putra Yoga Hamami Cahya Prastika tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Putra Yoga membahas kebijakan

pengembangan UMKM berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992.

15. Penelitian Shaifur Rizqi Zein (2015) dalam penelitian mengenai Analisis Formulasi Strategi Pengembangan Usaha Pada Koperasi Pemuda Tunas Patria (Koppatria) Sentra Industri Seni Patung Dan Ukir kabupaten Jepara. Hasil penelitian tersebut yaitu bobot kekuatan terbesar sampai terkecil 1) Memiliki gedung pemasaran produk unggulan, 2) memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan perbankan, 3) mempunyai unit penjualan bahan finishing yang berkembang baik, 4) pengurus yang solid dan berpengalaman, 5) fasilitas usaha cukup memadai, 6) letak gedung kantor yang strategis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Shaifur Rizqi Zein tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Shaifur Rizqi Zein membahas strategi pemerintah dalam pengembangan koperasi.
16. Penelitian Euis Hasmita Putri (2017) dalam penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota SAMARINDA (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda). Hasil Penelitian tersebut yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peranan penting dalam memberikan pelatihan, pemberdayaan, pembinaan,

sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku UMKM. Untuk faktor penghambatnya yakni minimnya dana atau biaya sehingga kegiatan pelatihan terbatas, sumber daya manusia yang belum memadai, teknik produksi dan manajemen terbatas, dan pemasaran relatif sulit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Euis Hasmita Putri tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Euis Hasmita Putri membahas pengembangan UMKM menggunakan kajian efektivitas dalam pelaksanaan program.

17. Penelitian P. Eko Prasetyo (2008) dalam penelitian Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Hasil penelitian tersebut yaitu Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Masalah paling utama dan pertama yang sering menjadi kendala keberadaan UMKM adalah rendahnya pangsa pasar dan modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian P. Eko Prasetyo tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas

kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian P. Eko Prasetyo membahas peran UMKM.

18. Penelitian Pradytia Herlyansah (2016) dalam penelitian Implementasi Kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang sudah baik, namun masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: tidak adanya Lembaga Keuangan Mikro di Kota Tangerang, tidak adanya sentra oleh-oleh, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi dan belum adanya database UMKM di Kota Tangerang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pradytia Herlyansah tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Pradytia Herlyansah menggunakan kajian implementasi kebijakan publik.
19. Penelitian Oktania Marlina Putri (2017) dalam penelitian Strategi Usaha Mikro Warga Miskin di Bidang Industri Gula Kelapa di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha yang diberdayakan warga miskin dibidang industri kelapa adalah strategi kemitraan,

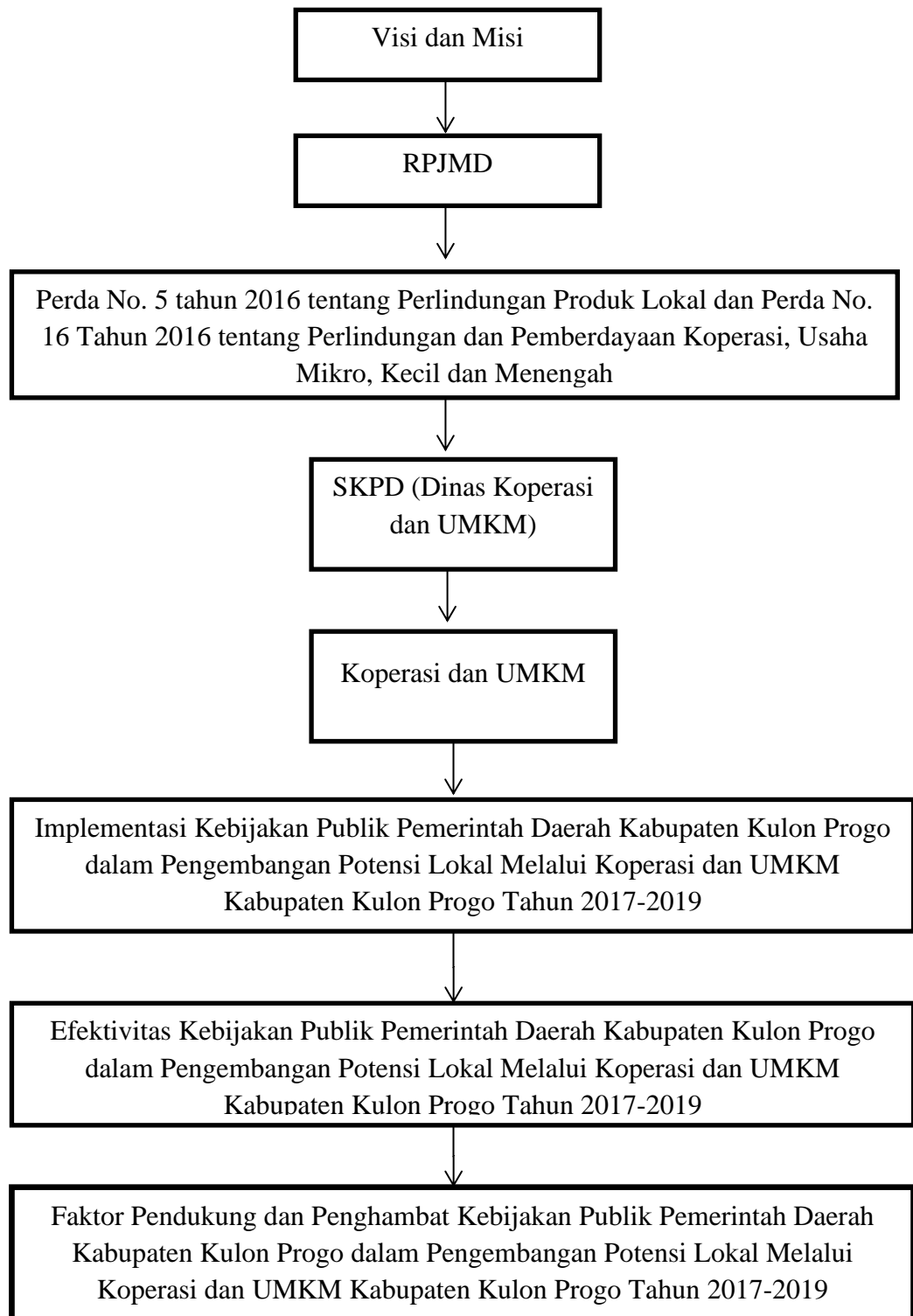
pemberdayaan dan modal venture. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro warga miskin di bidang industri di Kecamatan Kokap meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Oktania Marlina Putri tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Oktania Marlina Putri membahas strategi usaha mikro warga miskin.

20. Penelitian Muhammad Fathoni (2018) dalam penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pengembangan UMKM Bordir di Desa Padurenan pada tahun 2014-2018. Hasil penelitian tersebut 1) Peran pemerintah kabupaten Kudus dalam Pengembangan UMKM Bordir di Desa Padurenan pada tahun 2014-2018 dilaksanakan secara terprogram. 2) Faktor pendukung dan penghambat yaitu dukungan dari para *stakeholder*, *skill* kewirausahaan, sarana dan prasarana, dan dilakukan ahli bidangnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Fathoni tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Muhammad Fathoni membahas peran pemerintah dalam Pengembangan UMKM.

### **C. KERANGKA BERPIKIR**

Hasto Wardoyo menjabat sebagai Bupati Kulon Progo sejak 2011 dan menjabat untuk periode yang kedua yaitu tahun 2017. Untuk masa jabatan 2017-2022 Hasto Wardoyo menyusun RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang dibahas bersama dengan DPRD kemudian disahkan oleh Hasto Wardoyo. Pembahasan RPJMD menghasilkan Riparda RPJMD Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan yang dikeluarkan dan juga sebagai sarana untuk memantau kinerja Bupati dan SKPD setiap tahunnya. Kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo merupakan program pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan pada produk lokal Kulon Progo.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk lokal melalui koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan memberikan perlindungan produk lokal dengan semangat Bela dan Beli Kulon Progo dengan berdasarkan ekonomi kerakyatan. Koperasi dan UMKM sebagai obyek dalam pelaksanaan kebijakan untuk dapat mengembangkan dan melindungi potensi lokal Kulon Progo.

**KERANGKA BERPIKIR****Gambar 2.4 Kerangka Berpikir**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 menurut Matrik Matland harus memenuhi “empat tepat” yaitu: (1) Ketepatan Kebijakan, kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dilaksanakan berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal dan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM. Letak Kabupaten Kulon Progo yang strategis harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi lokal Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan membuka lapangan kerja. (2) Ketepatan pelaksanaan, Dinas Koperasi dan UMKM mengembangkan potensi lokal dengan adanya program Bedah Menoreh, kawasan industri Borobudur dan program bela dan beli Kulon Progo Kulon Progo



sehingga UMKM memiliki daya saing dengan adanya fasilitas HKI, pelatihan dan bantuan permodalan melalui pinjaman kredit perbankan, BUMN, BUMD serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi. (3) Ketepatan Target, pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM berhasil melakukan *take over* pada 19 toko modern menjadi TOMIRA (Tomira) bekerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, PT. Indomarco dan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo untuk memasarkan produk lokal Koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM sudah memiliki perizinan HKI. Jumlah anggota koperasi pengurus TOMIRA (Toko Milik Rakyat) bertambah karena UMKM pemasok TOMIRA (Toko Milik Rakyat) menjadi anggota koperasi. Koperasi dan UMKM pemasok terfasilitasi dalam memasarkan produknya. (4) Ketepatan Lingkungan, pemerintah Daerah, SKPD, dan masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM. Bupati Kulon Progo selalu melakukan pengawasan di lapangan untuk mengetahui perkembangan produk lokal Koperasi dan UMKM Kulon Progo. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana memberikan pendampingan pada koperasi dan UMKM berupa pelatihan, perizinan HKI dan permodalan. Masyarakat pelaku UMKM mendukung pelaksanaan kebijakan dengan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran produk.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 yaitu jiwa *entrepreneurship* yang masih rendah, masih adanya koperasi dan UMKM yang belum memiliki HKI, kemasan produk yang tidak sesuai standar, belum adanya UMKM Cneter sebagai tempat pelatihan, display dan konsultasi UMKM, belum adanya Rumah Kemasan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan dalam pengemasan produk serta pemasaran produk yang belum dilakukan secara *online* karena kebanyakan usaha Koperasi dan UMKM belum memiliki *marketplace*. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 yaitu dengan adanya fasilitas perizinan HKI dan pelatihan pengemasan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengurus usahanya sehingga produk memiliki daya saing dan memenuhi standar untuk masuk ke toko modern, dengan *take over* toko modern untuk memasarkan produk lokal menjadikan pemasaran produk lokal terfasilitasi.

## **B. SARAN**

1. Bagi Kepala Daerah, beberapa program yang belum tercapai untuk menjadi evaluasi SKPD dalam pelaksanaan program tersebut serta dilakukan pengawasan dan evaluasi mengenai faktor penghambat

dalam tercapainya program untuk mengetahui kendala apa saja yang didapatkan oleh SKPD.

2. Bagi SKPD, SKPD yang mengalami hambatan dan masalah dalam melaksanakan program untuk berkoordinasi dengan SKPD yang terkait maupun BKD untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
3. Bagi Masyarakat, masyarakat harus aktif dalam dalam mengontrol kebijakan, masyarakat juga aktif untuk berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya kebijakan sehingga kebijakan dan program dapat mencapai target yang dikehendaki.
4. Bagi DPRD, pengawasan anggaran kebijakan hendaknya dilakukan secara teliti karena dalam pelaporan dokumen LKPJ masih terdapat kesalahan berupa kesamaan keterangan dari dua SKPD yang berbeda serta evaluasi dari kebijakan agar dapat mengurangi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Kadji, Yuliyanto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Rush Media
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Taufiqurrokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo Beragama Pers

Winarno. Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

## **JURNAL**

Choirni, Rizqi. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengolahan Limbah Cangkang Kerang Di Pkbm Kridatama Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Semarang

Hatimah, Ihat. 2006. Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Potensi Lokal di PKBM.

Mayadri, Febri. 2017. Efektivitas Fungsi Terminal Gerbangsari Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017. Riau: Jom FISIP.

Simatupang, Pantjar. 2003. Analisis Kebijakan : Konsep Dasar Dan Prosedur Pelaksanaan Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1. No. 1. Maret 2003 : 1-21.

Utami, Puji dan Sulistyani Budiningsih. 2015. Jurnal Vol. 12 No. 2 Oktober 2015: Potensi Dan Ketersediaan Bahan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Di Kabupaten Banyumas.

Yuliatmoko, Welly. 2010. Inovasi Teknologi Produk Pangan Lokal Untuk Percepatan Ketahanan Pangan.

Zein,Shaifur Rizqi. 2015. Analisis Formulasi Strategi Pengembangan Usaha pada Koperasi Pemuda Tunas Patria (Koppatria) Sentra Industri Seni Patung dan Ukir Kabupaten Jepara. Semarang

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Peraturan Bupati Kulon Progo No 74 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal

Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan UMKM

Perbup No. 31 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil

**DOKUMEN**

Rencana Kerja (RESTRa) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo  
tahun 2017-2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Kulon Progo tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Kulon Progo tahun 2019

**WEBSITE**

<https://pilkada.tempo.co/read/849529/raih-85-persen-suara-hasto-wardoyopimpin-kulon-progo-lagi/full&view=ok> 17.45 Raih 85 Persen Suara. Hasto Wardoyo Pimpin Kulon Progo Lagi.